

**KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA
DALAM PEMIKIRAN
AKBAR TANDJUNG DAN A. MUHAIMIN ISKANDAR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

Achmad Riyanto
NIM: 03360190

Pembimbing :

- 1. Drs. A. Pattiroy, M. Ag**
- 2. Fathorrahman, S. Ag., M. Si**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia acap kali saat ini menjadi perdebatan hangat di kalangan para tokoh. Pasalnya, Indonesia telah lama mengklaim sebagai negara demokrasi, namun fakta di lapangan masih memperlihatkan pembungkaman aspirasi rakyat, kebebasan berpikir, kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Banyak kasus yang menampakkan bahwa bangsa Indonesia tak ubahnya seperti hidup di era pemerintahan Orde Baru yang menampakkan otoritarianisme pemimpin. Misalnya, penganiayaan aktivis yang menentang kebijakan pemerintah yg tak berpihak kepada rakyat dan aksi pemberantasan korupsi. Namun, pada sisi yang lain, demokrasi di Indonesia masih membuahkan hasil negatif, misalnya aksi pengrusakan di beberapa daerah yang mengatasnamakan demokrasi, kebebasan yang salah kaparah dan juga aksi anarkis melalui demonstrasi.

Fenomena inilah yang melatarbelakangi penyusunan skripsi ini untuk mengangkat pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar tentang demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, demokrasi adalah sebuah mekanisme tata kelola pemerintahan dimana rakyat dijadikan sebagai kekuatan utama. Penyelenggaraan negara oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Logika semacam ini juga diakui oleh kedua tokoh: Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha menemukan dan menggali konsep demokrasi di Indonesia dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder yang membahas dan berkaitan dengan demokrasi menurut pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar, sehingga nantinya diharapkan muncul kesimpulan yang komprehensif tentang konsep demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang berupaya mengumpulkan atau memaparkan konsep demokrasi di Indonesia menurut pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar secara obyektif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa bahwa pendapat Akbar Tandjung tentang konsep demokrasi di Indonesia ialah menginginkan adanya peran penuh dan partisipasi penuh dari rakyat. Rakyat adalah kekuatan utama dalam demokrasi. A. Muhaimin Iskandar juga memandang bahwa rakyat harus memiliki peran penuh dalam berdemokrasi. Pandangan Akbar Tandjung dan Muhaimin Iskandar terhadap demokrasi di Indonesia sama-sama menekankan pentingnya merujuk pada kultur lokal, adat istiadat, falsafah masyarakat setempat, dalam membangun demokrasi sehingga demokrasi di Indonesia akan bisa diterapkan dengan mengedepankan nilai.

Akbar Tandjung dan Muhaimin Iskandar sama-sama mengakui adanya perbedaan keyakinan, agama dan adat istiadat. Satu hal yang membedakan dua tokoh tersebut yaitu, mengenai persoalam konteks nilai keislaman dalam demokrasi. Dalam pandangan A. Muhaimin Iskandar tentang demokrasi, ia mengatakan bahwa konsep itu sesuai dengan asas Islam. Namun, Akbar Tandjung tidak menyinggung hal tersebut, namun bukan berarti tidak setuju.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Achmad Riyanto

Lamp : -

Kepada Yth :

Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Achmad Riyanto

NIM : 03360190

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Konsep Demokrasi Di Indonesia Dalam
Pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin
Iskandar

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqosyahkan, demikian dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2010

Pembimbing I

Drs. A. Pattiroy, M. Ag
NIP.19620327 199203 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Achmad Riyanto

Lamp : -

Kepada Yth :

Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Achmad Riyanto

NIM : 03360190

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Konsep Demokrasi Di Indonesia Dalam
Pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin
Iskandar

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqsyahkan, demikian dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2010

Pembimbing II

Fathurrahman, S. Ag., M. Si

NIP.19760820 200501 005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/ 142 /2010/56

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PEMIKIRAN AKBAR TANDJUNG DAN A. MUHAIMIN ISKANDAR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Achmad Riyanto

NIM : 03360190

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. A. Pattirov, M. Ag
NIP. 19620327 199203 001

Penguji I

Subaidi, S. Ag., M. Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji II

Witriani, SS., M. Hum.
NIP. 19720801 200604 2 002

Yogyakarta, 06 Desember 2010

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

MOTTO

Yakinku Atas Semua Mimpi-Mimpi Dan
Imajiku. Dan Melangkahlah Dengan Penuh
Keyakinan Karena Itu Adalah Awal Dari Sebuah
Perjalanan Untuk Mengukir Sejarah Kesuksesan
Dalam Hidup.

Persembahan

Kupersembahkan Skripsi ini:

Almamaterku Uin Sunan Kalijaga Sebagai Kampus Putih, Kampus Rakyat

Dan Kampus Perlawanan,

Untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Untuk Keluarga Besaraku di Sumenep dan Banyuwangi,

Untuk Kiyaku dan Para Guru Spiritualku,

Untuk Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),

Untuk Sahabat-sahabatku di Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia

(FORMASI),

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Inayah dan Taufik-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Engkaulah Sang Pengusa Jagat yang pantas disembah dan dipuja-puji semua isi alam semesta ini. Sujudku atas kuasa-digdaya-MU Sang Maha Agung. Hanya Engkau Sang sutradara sejati dalam kehidupan ini.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Syayidina Nabi Muhaammad SAW . Engkaulah yang telah mengajarkan kepada ummatmu untuk melawan terhadap penguasa lalim, para bandit yang congkak dan serakah. Engkau telah membuka cakrawala berfikir ummatmu untuk melakukan setiap perlawanan terhadap apapun yang tak pernah berpihak terhadap rakyat kecil. Engkau mampu mematahkan hegemoni kaum Quraisy yang telah menciptakan roda gila peradaban bengis dan keji. Atas kesempurnaanmu sebagai manusia sempurna, izinkanlah saya mengikuti jejakmu untuk membuka segala kemungkinan di alam semesta. Izinkan aku mengikuti jejak langkahmu untuk menjadi pemimpin yang mengabdikan kepada semua ummat. Sehingga Islam menjadi

rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Dan kita selalu harapkan syafa'at-Nya kelak di akhirat.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak berdiri sendiri. Dalam arti, penyusun mendapatkan banyak kontribusi dari pihak-pihak lain. Untuk itu, penyusun menghaturkan ribuan terima kasih kepada banyak pihak.

Diantaranya:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga sebagai penasehat akademik penyusun. Saya akan selalu ingat pesan Bapak untuk melakukan Mi'raj dalam segala hal.
2. Bapak Moh. Agus Najib, M. Ag, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Drs. A. Pattiroy, M. Ag., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan pembimbing I penulisan skripsi ini. Dedikasi Bapak terhadap melayani mahasiswa sungguh patut ditiru oleh para dosen-dosen lain. Bapak tak sekedar dosen tapi sahabat bagi mahasiswa Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Fathorrahman, S. Ag, M. Si., pembimbing II, dengan segala kesabaran hati dan jiwa, ketekunan, keuletan telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, selaku Ketua Jurusan PMH.
6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan PMH pada khususnya, yang telah mewariskan

ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta selaku orang tua kandung penyusun, yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial, demi lancarnya pendidikan penyusun. Ayah, Bunda terimah kasih atas do'a dan restunya disepertiga malam yang selalu engkau lantunkan untuk kesuksesan putramu ini. Salam dan ta'dhimku selalu ku sematkan untukmu. Teruntuk Mba' tersayang Maisura, selaku kakak kandung satu-satunya yang selalu memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis belajar di bangku kuliah.
8. Keluarga besar penulis baik yang di Madura dan Banyuwangi. Pamanda Rasyid, Rifka, Pamanda Hosen, Kak Ali Muridho dan Kak Aziz, terima kasih atas semuanya. Skripsi ini juga untuk Adik Mila Fransiska Lindawati, Windi, Dini dan Wiwit.
9. Akbar Tandjung (Ketua Dewan Pembina Partai Golkar) dan A. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB) sebagai inspirator dalam banyak hal. Sehingga buah pikirannya menginspirasi penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Malik Madany, MA (Khatib A'am PBNU) yang tak pernah lelah memberikan nasehat dan membingbing selama ini. KH. Abah Kowi (Tokoh Madura Yogyakarta) yang selama ini telah mengayomi dan menesahati penulis selama di bangku kuliah.

11. Mas Eman Hermawan (Ketua Umum DKN Garda Bangsa) dan Mas Umarruddin Masdar (Koordinator Wilayah Kaum Muda Nahdlatul Ulama DIY) yang tak pernah lelah memberikan nasehat, membimbing dan mengajari banyak hal dalam dunia gerakan dan spiritual. Dari mereka berdua penulis banyak belajar tentang banyak hal. Mas, jenengan telah mengajarku tentang kebersamaan dan persahabatan dalam mengukir sejarah di bangsa ini.
12. Mas Slamet Efendy Yusuf (Ketua PBNU), Arvin Thoza (Ketua PBNU), Muzayyin Mahbub (Sekjend Komisi Yudisial RI), Fajrul Falah (Komisi Hukum Nasional RI), Zaini Rahman (Anggota Fraksi PPP DPR RI), Moh. Hanif Dhakhiri (Sekjend. Fraksi PKB DPR RI), Ending Syarifuddin, Habib Sholeh, , Wardi Taufiq, Isfah Abidal Aziz, Jauhar Ali, Anas Nashin (Sekjend. GARDA BANGSA), Dedy Setiawan, Mas Yudistira dan semua senioriku yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bimbingannya selama menjadi aktifis.
13. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang DIY pada umumnya dan Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum (ashram bangsa) khususnya. Bagi penulis PMII adalah kawah candra dimuka karena dari PMII penulis banyak belajar sehingga memberikan arti menjadi sosok pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini dan dari PMII pula penulis mengerti akan tanggungjawab sosial dan kebangsaan sebagai generasi penurus bangsa Indonesia.

14. Sahabat-sahabat seperjuangan sekaligus guru, Anfasul Marom, Kak Syaifuddin, Shofi, P'iq Takiyuddin, Mu'is, A'im, Beny, Barbares, Anwar, Kaisar A. Hanifah, Bustanul Arifin, Bejo Sarekat, Dedi Hernanto, Rifky elmoe dll. Terima kasih atas dialektikanya selama menjadi aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
15. Special Sahabat-sahabat Korp. Santun, Miftahul Aziz, Hesbul Bahar, Slamet Priyadi, Bony, Abdurrahim, Rere, Pendi Putranta, Ali Shodikin, Hadi, Fandy, Yusuf Jailani, Zuhdan, Amien, Jauharatul Aliyah, Rina, Farida Ulvi Na'imah, Aida, Kokom, Muniroh, Firoh, Ita Dwi Indrayati, Rina dan semuanya. Terima kasih atas dialektika dan kebersamaan yang selama ini kita rajut bersama. Dari kalian semua penulis bisa belajar arti sahabat dan indahnya kebersamaan. Dan berkat kalian juga penulis termotifasi untuk selalu berkarya dan bergerak mewujudkan mimpi yang pernah kita dendangkan bersama. Kalianlah yang selalu memacu semangat dan telah meliarkan imajiku untuk selalu berkarya dan mengukir sejarah dalam ruang gerak peradaban. Kalian tak sekedar sahabat tapi saudara yang tak terlahir pada satu rahim.
16. Sahabat-sahabat Korp. Got. Gestra, Santun, Apatiss, Germanis, Linggar, Gengster, Petir, Gertak dan Gempha. Terutama para aktor gerakannya, di antaranya Ach. Muhaimin, Dila, A'an, Ro'is Wisda, Muhammad Darwis, Khafif Sirojuddin, Yazid, Aris, Ismam, Kipli, Nur Hidayat, Joni Suherman, Jay, Irfana Muthi'ah, Hana, Alma, Yani, Agus, Abeng, Ulil, Qurnain, Rukmini, Aziz Budiharjo, Isna, Inoeng, Anjani, M. Fakhriyan

Anas, Gufron, Habib, Romel, Tile, Imam, Imad, Sucipto, Rifak dan Rifa'i. Tak lupa sahabat-sahabat lintas rayon, Jauhari, Zamroni, Fikar, Jen, Yuyun Libriyanti, Sobri, Mufidul Waro dll. Kalian adalah spirit dan motifasi tersendiri buat penulis. Bersama kalian tak terasa penulis melewati waktu demi waktu di Yogyakarta. Kalian semua sahabat sejutiku. Penulis hanya berpesan, janganlah kalian sia-siakan berproses di PMII. Kalian telah memacu semangatku di medan gerakan ini untuk menjadi kader gerakan, sehingga kesetiaan akan komitmen bersama menjadi wahyu bagi penulis untuk berkarya dalam roda gila kehidupan ini. Penulis yakin kelak kalian akan menjadi pemimpin bangsa dan kerja-kerja peradaban kalian akan kalian petik dikemudian hari.

17. Sahabat-sahabat senasib, Ja'far Shodik, Abdurrahman, Edwin, dan Rahmatullah. Bersama kalian penulis temukan banyak kenangan suka, duka dan keriangen selama berproses di kantor Cabang PMII yang hari ini telah jadi kontrakan kita bersama.
18. Sahabat-sahabat Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia. Terima kasih atas dialektika dan kepercayaannya pada penulis. Sehingga penulis kalian beri amanat dan kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (DPP FORMASI).
19. Teman-teman mahasiswa Jurusan PMH-2 angkatan 2003 dan muda-mudi kampung Gapura Barat yang telah membantu terlaksananya penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

20. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu di sini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita, dan bagi studi akademik berikutnya.

Amin Ya Robbal 'alamin.

Wallahul Muafiq Ila Aqwamit Thoriq

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1432 H.

21 Juli 2010 M

Penyusun

ACHMAD RIYANTO

NIM : 03360190

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI

A. Pengertian.....	27
B. Demokrasi Sebagai Mekanisme Sistem Pemerintahan.....	28
C. Prinsip-prinsip Demokrasi.....	30
D. Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan.....	33
E. Demokrasi Sebagai Sistem Politik.....	34
F. Demokrasi Sebagai Sikap Hidup.....	35
G. Demokrasi di Indonesia.....	36
H. Sisi Buruk Demokrasi.....	39
1. Prinsip Persamaan Hal yang Tidak Sehat.....	39
2. Pemujaan Atas Ketidakmampuan.....	40
3. Mobokrasi.....	40
4. Oligarchy yang Terburuk.....	41

5. Pemerintahan yang Kapitalis.....	42
6. Pemerintahan oleh Sekolompok Kecil.....	42
7. Sistem Partai yang Korup dan Melemahkan Bangsa.....	43
8. Menghalangi Perkembangan Sosial.....	43
9. Menghalangi Perkembangan Intelektual.....	44
10 Demokrasi adalah Bentuk Pemerintahan yang Mahal....	44

BAB III BIOGRAFI AKBAR TANDJUNG DAN A. MUHAIMIN ISKANDAR SERTA PANDANGANNYA TENTANG KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Biografi Akbar Tandjung.....	46
1. Kehidupan Keluarga.....	46
2. Riwayat Pendidikan.....	47
3. Karir di Pemerintahan.....	48
4. Pengalaman Internasional.....	50
5. Penghargaan dan Kehidupan Pribadi.....	51
B. Pandangan Akbar Tandjung Tentang Konsep Demokrasi di Indonesia.....	52
1. Sistem Politik Demokrasi Terbuka.....	52
2. Demokrasi dan Legitimasi Eksekutif.....	56
3. Demokrasi dan Risiko Konflik.....	57
4. Peran Sipil dalam Demokrasi.....	59
5. Demokrasi Berorientasi Nilai.....	60
C. Biografi A. Muhaimin Iskandar.....	65
1. Kehidupan Keluarga.....	65
2. Pendidikan dan Karir di Pemerintahan.....	66
3. Pengalaman Kerja dan Pengalaman Organisasi.....	67
4. Pergulatan di Dunia Politik Praktis.....	69

D. Pandangan A. Muhaimin Iskandar Tentang Konsep Demokrasi di Indonesia.....	72
1. Demokrasi Sebagai Tujuan dan Sarana Pemerintahan	72
2. Demokrasi dan Nilai-Nilai Agama.....	79
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN AKBAR TANDJUNG DAN A. MUHAIMIN ISKANDAR TENTANG KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA	
A. Signifikansi Demokrasi dalam Kehidupan Rakyat.....	83
B. Analisis Pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar Serta Persamaan dan Perbedaan Pandangan Kedua Tokoh Tentang Konsep Demokrasi di Indonesia....	94
1. Analisis Partisipasi dan Kebebasan Rakyat dalam Berdemokrasi.....	95
2. Analisis Kepemimpinan dalam Berdemokrasi.....	97
3. Analisis Demokrasi dalam Konteks Keislaman di Indonesia.....	98
4. Analisis Demokrasi dan Budaya Lokal.....	102
5. Analisis Demokrasi Sebagai Tujuan dan Alat.....	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	II
LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus seputar sistem negara bernama demokrasi seakan tiada habisnya. Terbukti, pada abad XXI yang dikenal dengan abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, demokrasi masih menjadi pilihan utama berbagai negara di belahan dunia. Bahkan bisa dikatakan, demokrasi menjadi virus yang mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya sistem terbaik yang pernah ada.¹ Hal ini tidak lepas dari peran Amerika Serikat yang selalu gencar mengampanyekan demokrasi sebagai sistem satu-satunya yang membawa kemaslahatan negara terhadap rakyatnya. Diterimanya demokrasi sebagai sistem terbaik dari sebuah negara hanya karena demokrasi mencerminkan kemajemukan semua golongan dan menyerukan hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya tanpa adanya diskriminasi ras, agama, maupun golongan.

Kata “demokrasi” selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat sipil apalagi di kalangan politisi serta menjadi konsumsi publik sehari-hari di negeri ini. Di samping itu, demokrasi seolah-olah tidak lagi

¹ Runtuhnya Tembok Berlin sebagai pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur serta tumbangannya Uni Soviet sebagai pemimpin Blok Timur Sosialis menandakan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur sudah berakhir, sehingga konstelasi politik global-pun telah bergeser. Hal ini juga menandakan berakhirnya pertarungan ideologi besar dunia dan rebutan pengaruhnya terhadap negara-negara dunia ketiga. Francis Fukuyama melihat kemenangan Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai kemenangan ideologi kapitalis dan demokrasi liberal. Lihat: Mohtar Maso'ed, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24.

menjadi hal yang ambigu, apalagi *kran* demokrasi melalui reformasi 1998 dibuka seluas-luasnya, dan siapa pun bisa mengakses untuk mengamati dan terjun langsung di dalamnya.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, demokrasi sebenarnya telah lama dianut sebagai sistem ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, dalam perjalanannya kemudian demokrasi tidak jarang menuai beragam hambatan atau bahkan ancaman. Salah satu ancaman terbesar yang sedang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini adalah keputusan terhadap demokrasi itu sendiri yang belum berbanding lurus dengan tujuannya, serta melemahnya kekuatan gerakan demokrasi dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang anti demokrasi.

Indonesia mengalami kehidupan politik yang demokratis untuk waktu yang tidak terlalu lama. Kehidupan politik demokratis itu hanya berlangsung antara tahun 1950-1959.² Lemahnya pra-syarat sosial-ekonomi dan infrastruktur ikut mempengaruhi pendeknya usia demokrasi. Demikian pula, tipologi elit politik nasional yang ada belum tertransformasikan dari *disunified elite* ke *consensually unified elite*—suatu kondisi yang menyulitkan tercapainya kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan di antara mereka.³

Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut sejak lahirnya Republik ini hingga sekarang. Secara singkat, pasang-surut

² Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 144.

³ Laith Kubba, "Recognizing Pluralism", dalam *Journal of democracy*, Vol, 7, no. 2 (1996): 86-89. Lihat, Bachtiar Effendy, *Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik di Indonesia*, dalam buku, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: PARAMADINA, 2005), hlm. 167.

demokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan tingkah laku para elitnya, apakah mereka berhati lapang, atau malah berhati sempit dan tidak bertanggungjawab. Sikap miopik dan parokial ini terutama bersumber pada kondisi lemahnya kultur ke-negarawan-an yang diindap sebagian besar politisi di Indonesia.⁴

Indonesia termasuk sebagai bangsa yang beruntung karena sejak awal mayoritas rakyatnya telah memilih sistem demokrasi untuk mengatur negara yang baru lahir. Penduduknya yang mayoritas muslim hampir tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat didikan yang diberikan oleh para pemimpinnya (*founding fathers*). Kenyataan ini merupakan modal penting untuk dikembangkan lebih secara bertanggung jawab. Adapun buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan kelemahan pemimpin negeri ini dalam berpolitik. Upaya perbaikan sistem ini harus dilakukan terus menerus tanpa merasa bosan, sekalipun pada hasilnya sering menyakitkan dan melelahkan.⁵

Genderang reformasi yang ditabuh mahasiswa dan berbagai elemen bangsa pada 1998 adalah perjuangan rakyat melepas kekuatan otoriter Orde Baru. Barisan pemuda, khususnya para mahasiswa kala itu, merapatkan barisan dalam aksi demonstrasi menentang pemerintah, bahkan kemudian menggulingkannya.⁶ Salah satunya adalah A. Muhaimin Iskandar dan Akbar

⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 161.

⁵ *Ibid*, hlm. 162.

⁶ *Majalah Biografi Politik*, volume 1. No. 5, September 2008, hlm. 147.

Tandjung yang masing-masing mengimplementasikan lewat partai politik. A. Muhaimin Iskandar aktif di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu partai politik yang baru lahir pasca reformasi dan Akbar Tandjung menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui kendaraan politik Golongan Karya (GOLKAR) yang *nota bene*-nya partai penguasa di era Orde Baru.

Pasca reformasi, Presiden BJ. Habibie memiliki jasa yang cukup besar dalam memberi ruang yang luas bagi perkembangan demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari desakan sebagian besar rakyat Indonesia akibat akumulasi kekecewaan terhadap rezim otoriter Soeharto. Melalui pintu demokrasi yang terbuka lebar juga, kekuasaan Habibie tidak dapat dipertahankan pada SU-MPR 1999. Reformasi 1998 dengan demokratisasi sebagai agenda utamanya telah membuka babak baru sekaligus menjadi titik balik dalam konstelasi politik nasional menuju ke arah yang lebih sehat, demokratis dan terbuka.

Terpilihnya Gus Dur dan Megawati secara mengejutkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada SU MPR 1999 memberikan langgam kepastian bahwa roda demokratisasi akan terus bergerak⁷. Terlepas dari berbagai manuver politik yang mengkhawatirkan kehidupan demokrasi, tindakan politik Gus Dur selaku Presiden RI sangat bermakna dalam memantapkan watak dan gerakan demokrasi di tengah kebuntuan demokrasi di masa-masa sebelumnya. Kesadaran yang mendalam dari segenap elemen bangsa dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi yang baik, telah

⁷ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama*, (Yogyakarta: KLIK R, 2006), hlm. 95

menyelamatkan bangsa kita dari bahaya disintegrasi akibat perbedaan pandangan politik yang tajam.

Harus diakui, demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan yang berarti dipandang dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hingga Pilkada langsung dapat berjalan dengan bebas, transparan, demokratis, dan dalam suasana damai. Kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), kebebasan berserikat (*freedom of assembly*) dan kebebasan pers (*freedom of press*) jauh lebih baik dibanding pada zaman Orde Baru.⁸

Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut mengakibatkan terciptanya harapan besar masyarakat untuk adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibanding pada masa sebelumnya (baca: orde baru), serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Namun demikian, dalam realitas harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan-pun nyaris seperti Orde Baru, sementara sirkulasi elit politik nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku yang mendasar.

⁸ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 99.

Di sisi lain, tiga belas tahun sudah reformasi bergulir ternyata belum mampu membawa bangsa ini keluar dari jeratan krisis multidimensional. Di era transisi ini, rakyat memang bisa menghirup udara kebebasan berpolitik tanpa harus khawatir adanya intimidasi dari korps berseragam loreng. Dua kali pemilu dilaksanakan dan tiga kali terjadi pergantian presiden—KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun faktanya secara substantif belum mampu membawa rakyat beranjak dalam taraf kesejahteraan. Rakyat masih saja hidup di bawah garis kemiskinan, angka pengangguran semakin membengkak, utang luar negeri makin menumpuk dan budaya korupsi masih saja mewarnai kehidupan elite-elite politik negeri ini.⁹

Pada level formal-prosedural proses demokratisasi di Indonesia yang menggelinding sejak reformasi 1998 sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Mulai dari amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah secara langsung dan pembentukan beberapa institusi demokrasi menjadi landasan yang memadai untuk menopang proses pembaharuan politik dan pelembagaan demokrasi di Indonesia. Amandemen keempat UUD 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam BAB VIIA pasal 22C-22D, Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam BAB IX pasal 24C-25, Komisi Yudisial (KY) diatur dalam BAB IX pasal 24B,¹⁰ dan beberapa Komisi Negara lainnya. Tradisi politik baru yang lebih demokratis sudah mulai tumbuh, lembaga-lembaga politik juga mulai

⁹ *Ibid.*, hlm. 99-100.

¹⁰ UUD RI 1945 Pasca Amandemen yang keempat

ditata lebih baik yang memungkinkan terjadinya percepatan proses konsolidasi demokrasi.

Akan tetapi, lahirnya kultur politik dan institusi-institusi politik demokratis yang tercermin dalam pemilihan presiden langsung, amandemen UUD 1945, dan lain sebagainya tidak berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Secara substansial, kehidupan masyarakat terutama menyangkut kesejahteraan tidak kunjung membaik. Terbukti dengan angka pengangguran yang tidak bisa ditekan, bahkan meningkat. Hasil pusat statistik Badan Penelitian Statistik (BPS) tahun 2004 menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 9,5 juta pengangguran terbuka. Jumlah ini diukur berdasarkan ukuran satu jam bekerja selama seminggu. Artinya, jumlah pengangguran yang sesungguhnya, berdasarkan kebutuhan wajar untuk bekerja jauh lebih banyak.¹¹

Sepenuhnya kita menyadari bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang abadi, ia dapat berdiri atau terbaring menang atau kalah, namun tidak akan pernah mati. Karena demokrasi adalah sistem nilai yang menjadi ruh dari jiwa-jiwa merdeka yang akan senantiasa hidup sepanjang masa. Sejarah bangsa yang telah membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak pernah mati. Perlawanan rakyat yang menuntut hak-hak dasar politiknya terhadap rezim otoriter Soekarno maupun Soeharto adalah bukti bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar bisa dipunahkan. Ada masa pasang dan surut kehidupan demokrasi, sebagaimana kita alami hingga hari ini.

¹¹ Dokumentasi Hasil Mukhtamar II Partai Kebangkitan Bangsa Semarang, 16-19 April 2005, cet. II (Jakarta: DPP PKB, 2005) hlm. 80.

Sistem demokrasi tentu tidak selalu menyenangkan bahkan terkadang menyakitkan, sebab dalam proses demokrasi senantiasa menghasilkan kemenangan dan kekalahan. Sikap seorang demokrat sejati akan terlihat di saat ia menghargai kemenangan kelompok lain maupun saat menerima dengan lapang dada atas kekealahannya. Sekalipun banyak cara dan jalan menuju demokrasi, namun hasil demokrasi tidak memberikan pilihan yang banyak. Penghargaan kepada yang menang dan kalah dalam suatu kontestasi politik merupakan kemenangan yang gemilang bagi demokrasi.

Sangat beragam pendapat para pakar politik tentang konsep dasar demokrasi dari teori politiknya. Mengingat sejarah politik banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak akademi Plato sampai institusi pendidikan besar masa kini studi politik selalu mendapat sambutan hangat dan tempat yang terhormat.¹²

Hal semacam ini terasa tidak asing lagi jika kita melihat fenomena yang mewarnai pentas politik nasional, yaitu dengan maraknya kampanye yang mereka lakukan dalam bentuk aksi massa maupun melalui media, dengan menyuarakan pandangan politik mereka terhadap isu-isu aktual dengan senantiasa menyisipkan isu tentang pendirian negara Islam sebagai solusi paling manjur atas problematika kebangsaan.¹³ Ditambah lagi dengan semakin

¹² Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. V

¹³ Partai pengusung teks Piagam Jakarta antara lain adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam pemberitaan bahwa PPP tetap akan memperjuangkan Piagam Jakarta untuk masuk dalam UUD 1945. Lihat Satya Arinanto, "Piagam Jakarta dan Cita-cita Negara Islam", dalam Kurniawan Zein dan Saripudin HA (ed.), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 57.

menghangatnya permasalahan terorisme dengan segala tafsir dan perdebatan yang dari tahun ke tahun semakin menemukan tempatnya dalam peta politik nasional maupun internasional.

Penulis ingin melihat persoalan demokrasi sebagai sistem politik dan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini dijadikan sebagai landasan untuk melihat persoalan politik Indonesia ke arah yang lebih filosofis. Artinya landasan teoritis apakah yang kemudian dijadikan dasar gerakan politiknya?. Bagaimana sebenarnya pemaknaan demokrasi itu sendiri?.

Sebelum dibahas lebih jauh, penulis ingin menegaskan bahwa akan sangat merepotkan, ketika penulis harus melihat persoalan politik pada tema-tema besar seperti di atas. Maka penulis mengambil alternatif kajian melalui studi pemikiran terhadap tokoh yang memiliki basis historis dalam dunia politik khususnya di Indonesia, baik secara intelektual maupun pengaruhnya dalam perkembangan politik kebangsaan. Oleh karena itu, penulis memilih seorang tokoh yang bernama Akbar Tandjung (Mantan Ketua DPR-RI Periode 1999-2004) dan A. Muhaimin Iskandar yang saat ini sedang menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB).

Sebagai intelektual muda dan sebagai tokoh politik nasional Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar banyak memiliki gagasan yang brilian di

Sermentara sejumlah Ormas pengusung Piagam Jakarta adalah Front Pembela Islam (FPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Muslim Antar Kampus (HAMMAS), Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (HMMI), Komite Indonesia Untuk Solidaritas Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Lihat A. Syafii Maarif, dalam Kurniawan Zein dan Saripudin HA (ed.), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. xix.

bidang politik dan demokrasi. Hal ini bisa dimafhumi tidak semata-mata karena mereka berdua intens dalam pergulatan di pentas politik nasional dan pernah memimpin salah satu partai terbesar di Indonesia yaitu Akbar Tandjung (Mantan Ketua Umum GOLKAR) dan A. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB). Disamping itu, dua sosok itu juga mengalami proses panjang dalam pergulatan intelektual dan sangat produktif dalam menorehkan gagasan-gagasan baru.

B. Pokok Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun mencoba mengangkat permasalahan yang perlu dikaji dan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep demokrasi dalam pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar?
2. Apa perbedaan dan persamaan seputar konsep demokrasi di Indonesia menurut keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelusuri pemikiran politik Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar tentang konsep demokrasi. Kajian ini bukanlah suatu hal yang sederhana karena kajian yang secara khusus membahas sepak terjang keduanya serta pemikiran politiknya masih

sangat jarang atau bahkan belum ada sama sekali yang mengkaji secara komprehensif tentang pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar.

Karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menelusuri pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar tentang demokrasi dalam wacana politik Indonesia.
- b. Menjelaskan implikasi dari pemikiran politik Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar dalam merumuskan konsep demokrasi.
- c. Mencoba membedah sejauh mana kontribusi pemikiran politik Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar bagi perkembangan diskursus demokrasi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi dan manfaat secara teoritis maupun praktis:

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam domain demokrasi dan negara.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang demokrasi di Indonesia.
- c. Menjadi pedoman bagi para praktisi politik dalam menjalankan etika (*fatsoen*) politik di wilayah politik praktis.

D. Telaah Pustaka

Berangkat dari asumsi di atas maka penelitian ini akan memfokuskan diri pada telaah pustaka yang membahas tentang demokrasi menurut A. Muhaimin Iskandar dan Akbar Tandjung, yang di antaranya:

[1] “*Melampaui Demokrasi, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*”¹⁴. Buku ini merefleksikan sewindu usia PKB. Dengan gamblang menjelaskan strategi pengembangan PKB di tengah kompleksitas persoalan bangsa baik dari sisi internal PKB maupun dari aspek eksternal. Menariknya dari buku ini adalah PKB menempatkan demokrasi bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana (*wasilah*) untuk mencapai tujuan itu sendiri.

Oleh karena itu, PKB tidak perlu menghabiskan seluruh energinya untuk membicarakan sarana atau alat itu yang akan membuatnya kehilangan orientasi, fokus, dan keluar dari tujuan kolektif yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dengan kata lain, kita perlu melampaui demokrasi, bukan untuk mencederainya.

[2] “*Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons*”¹⁵. Disertasi ini merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Akbar Tandjung untuk mendapatkan Gelar Doktor di UGM. Buku ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan Partai Golkar bertahan

¹⁴ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*, (Yogyakarta: Kerjasama DPP PKB & KLIK®, 2006)

¹⁵ Akbar Tandjung, *Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007)

hidup (*survive*) dan mampu berperan dalam lingkungan politik baru yang demokratis. Disertasi sebagai satu-satunya studi tentang *survival* partai politik pada era reformasi di Indonesia.

[3] “*Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan tentang Transisi Demokrasi Kita*”¹⁶. Buku ini sebenarnya catatan pribadi penulis tentang sosok Gus Dur. Secara global buku ini mencoba menguraikan dinamika perjalanan demokrasi Indonesia, mulai dari naiknya KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden keempat Indonesia sampai dengan detik-detik lengsernya Gus Dur melalui “*kudeta politik*”.

[4] “*Melampaui Demokrasi: Eksperimentasi Pemikiran Politik A. Muhaimin Iskandar*”¹⁷. Skripsi ini mengulas tentang proses terbentuknya genealogi pemikiran politik A. Muhaimin Iskandar dan konsepsi Muhaimin Iskandar tentang Melampaui Demokrasi dan relevansinya dengan konstelasi politik di Indonesia, serta sumbangan ilmiah bagi perkembangan konsesi demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, penulis belum menemukan skripsi, thesis, disertasi maupun buku yang secara khusus membahas tentang konsep demokrasi menurut Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar.

¹⁶ A. Muhaimin Iskandar, *Gusdur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan tentang Transisi Demokrasi Kita*, (Yogyakarta: LKiS, 2004)

¹⁷ Kaisar A. Hanifah, *Melampaui Demokrasi: Eksperimentasi Pemikiran Politik A. Muhaimin Iskandar*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

E. Kerangka Teoritik

Dalam khazanah teori politik, masalah demokrasi merupakan pembicaraan (*discourse*) yang cukup urgen. Meskipun demikian, suatu hal yang tidak kalah mendasarnya adalah soal penerapan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Hal ini merupakan fenomena menarik yang akhir-akhir ini menjadi diskursus panjang-lebar dan bahkan menjadi perdebatan yang cukup melelahkan. Salah satu dimensi persoalan yang selalu melahirkan sudut pandang berbeda adalah menyangkut bagaimana demokrasi seharusnya menempatkan diri dalam sistem sosial-politik di negeri ini.

Banyak para pemikir politik klasik, modern hingga neo-modern, yang mencoba memberikan sebuah penjelasan mengenai konsep demokrasi, dengan beragam cara pendekatan dan metode yang berbeda-beda.¹⁸ Oleh karena itu, penting kiranya dalam karya ilmiah ini dijelaskan pula pengertian demokrasi.

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.¹⁹ Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini.

¹⁸ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 12.

¹⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), cet. III, hlm. 154.

Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *kedua*, demokrasi sebagai asa kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.²⁰

Wacana demokrasi yang berkembang saat ini dan telah dijadikan sebagai sistem negara di Indonesia, merupakan hasil dari reduksi dari pemikiran atau pendapat para filsuf dari Plato hingga pasca Renaissance. Pandangan beberapa filsuf tentang demokrasi, adalah sebagai berikut:

- a. Plato memandang demokrasi dekat tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.
- b. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran *politeia*, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
- c. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung, termasuk Locke sendiri tetap menganut monarki terbatas.

²⁰ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 130-131.

- d. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan, lebih suka monarki konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebijakan kewarganegaraan. Ia berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tidak akan tercapai.
- e. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Menurutnya, bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka macam pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan menunjang pemikiran demokratis.
- f. Amerika Serikat mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas.²¹

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.²²

²¹ *Ibid.*, lihat juga dalam Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hlm. 155-156.

²² *Ibid.*, Lihat juga dalam: A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, . Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, hlm. 131.

Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Joseph A. Schemer mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat;
- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang telah terpilih.²³

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas, maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²⁴

2. Ruang Lingkup Demokrasi

Prinsip terpenting demokrasi adalah *kewarganegaraan (citizenship)*. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain,

²³ *Ibid.*, hlm. 132.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebaskan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.²⁵

Untuk mencapai demokrasi yang ideal, menurut Robert Dahl, setidaknya lima prasyarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, dalam membuat keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat, hak istimewa setiap warga negara harus diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan akhir. *Kedua*, dalam setiap proses pengambilan keputusan kolektif, maka setiap warga negara harus mempunyai hak yang sama untuk menyatakan hak-hak politiknya. *Ketiga*, adanya pembeberan kebenaran. Di sini setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dalam penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan. *Keempat*, adanya kontrol terakhir terhadap agenda. Di sini warga negara juga memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi ketiga hal di atas. Ini dalam rangka untuk menghindari adanya pengambilan-pengambilan keputusan yang dibuat dengan cara-cara tidak

²⁵ Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, cet. I (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 8-9.

demokratis. *Kelima*, pencakupan atas semua elemen masyarakat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitan penegakan hukum.²⁶

Menurut Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki "*sovereignty*" berhak untuk memerintah. Karena itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat (*democratic government by and with the consent of the people*). Dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln disebut "*government by people*" tersebut direpresentasi dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.²⁷

Ada banyak definisi tentang demokrasi, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Namun, yang paling populer adalah yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini demokrasi harus dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, sisi substansial (nilai hakiki), di mana demokrasi hanya bisa tegak kalau ada sesuatu nilai-nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya. Misalnya adanya kebebasan (*freedom*), budaya menghormati kebebasan orang lain, adanya pluralisme, toleransi dan anti intimidasi (kekerasan). *Kedua*, sisi dimensi

²⁶ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, hlm. 60.

²⁷ Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*, (Yogyakarta: PONDOK EDUKASI, 2004), hlm. 12.

prosedural (aturan atau tata cara), di mana demokrasi hanya bisa tegak jika ada prosedur-prosedur formal yang memungkinkan nilai dan budaya demokrasi itu ada dan berjalan. Pemilihan umum yang bebas, adanya DPR yang kuat, lembaga yudikatif yang independen adalah termasuk bagian dari aspek prosedural demokrasi.²⁸

Selain pengertian di atas, demokrasi prosedural menurut Huntington adalah demokrasi sebagai persoalan tata cara memerintah, sedangkan demokrasi substansial adalah nilai-nilai yang terkandung dalam esensi demokrasi, seperti kebebasan, keadilan, persamaan hak dan sebagainya yang menekankan peranan agen (individu) sebagai determinan pokok.²⁹

Pada abad XIX, pengertian demokrasi lagi mengikuti tradisi pemikiran *Schumpeterian*, di mana demokrasi dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang penuh melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil guna memilih kandidat-kandidat yang berhak memangku jabatan politis.³⁰

Demokrasi modern memiliki spesifikasi yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis diperlukan institusionalisasi nilai-nilai demokrasi yang substansial menjadi nilai yang terlembagakan. Demokrasi prosedural mengharuskan adanya

²⁸ Eman Hermawan & Umaruddin Masdar, *Demokrasi untuk Pemula*, (Yogyakarta: KLIK®, 2000), hlm. 28-29.

²⁹ Mohtar Maso'ed, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

pemilu sebagai salah satu ruang bagi warga negara berkontestasi dan berkompetisi secara sehat dalam pemerintahan.³¹

Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi tidak bisa dilepas dari dua sisi di atas yaitu substansi dan prosedur, yakni prosedur sebagai cara untuk mencapai substansi sehingga keduanya tidak saling menegasikan, serta berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, demokrasi dapat tumbuh dan berkembang jika substansi dan prosedur berjalan beriringan.

F. Metodologi Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan penelitian (*library research*) yang berusaha menemukan dan menggali konsep demokrasi di Indonesia dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder yang membahas dan berkaitan dengan demokrasi menurut pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar.

³¹ Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*, hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-komparatif-analitis, yaitu mengumpulkan atau memaparkan konsep demokrasi di Indonesia menurut pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar secara obyektif, kemudian menganalisanya dengan menggunakan teori yang telah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Yaitu, telaah kritis terhadap konsep demokrasi di Indonesia menurut pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar berdasarkan data-data yang ada, baik dari karya-karya kedua tokoh, statemen-statemen kedua tokoh dalam forum seminar, diskusi, bahkan juga dari wawancara.

4. Sumber Data

Melihat kajian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), maka sumber datanya adalah karya-karya yang ditulis oleh Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar baik buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis oleh Akbar Tandjung dan A. Muhaimin

Iskandar baik buku, jurnal, artikel, tesis yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Bahkan, penyusun juga akan berusaha melakukan wawancara dengan kedua tokoh.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bersifat *free interview*,³² yakni bersifat informal, terbuka dan terstruktur, yaitu peneliti melakukan wawancara seperti percakapan biasa, dan waktu yang digunakan disesuaikan dengan kesepakatan peneliti dengan sumber informasi, sehingga sumber dengan leluasa mengungkapkan, mengurai, dan menjelaskan.

Adapun yang diwawancarai dalam hal ini adalah Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar sendiri, bahkan beserta orang-orang yang dekat dengannya, mulai dari keluarga, kolega, cendekiawan, aktivis, bahkan kaum profesional.

b. Data Sekunder

Kemudian data-data sekunder yang dipakai dalam pembahasan di skripsi ini adalah berupa sumber-sumber tambahan seperti artikel-artikel tentang demokrasi di internet, media massa, seminar-seminar, blog, dan lain sebagainya.

³² *Free interview* adalah jenis wawancar berstruktur, di mana pewawancara yang memakai teknik ini biasanya hanya dibimbing oleh *interview guide* yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang ingin dipersoalkan oleh pewawancara. Lihat J. Vredendregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 93. Dalam hal ini Koentjaraningrat juga menjelaskan bahwa *free interview* adalah teknik wawancara yang tidak mempunyai pusat, pertanyaan yang diajukan biasanya berpindah-pindah dari satu pokok masalah ke pokok masalah lain, sementara data yang diperoleh bias beragam. Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 139.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu;

- 1). Metode Deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisa pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar tentang konsep demokrasi di Indonesia yang kemudian dianalisa.
- 2). Metode komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.³³ Metode ini akan menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar tentang konsep demokrasi di Indonesia untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I terdiri dari tujuh sub bab: *pertama*, yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang penyusun teliti. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan. Tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah

³³ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada bab II, berisi tinjauan umum demokrasi. Kajian ini membicarakan tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, tujuan demokrasi, landasan demokrasi dan membahas mengenai demokrasi politik dan hukum.

Bab III mengkaji tentang bioografi Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar, serta membahas mengenai pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar tentang konsep demokrasi di Indonesia untuk kemudian dianalisa. Sehingga, dengan adanya uraian ini akan menjadi jelas sumber pokok atau obyek yang diteliti.

Bab IV berisikan analisis komparatif pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar tentang konsep demokrasi di Indonesia. Dengan analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran persamaan dan perbedaan antara keduanya, serta mencari kontribusi untuk pembangunan demokrasi di Indonesia.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituangkan dalam bab V yang sekaligus merupakan bab penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan tentang pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar tentang konsep demokrasi di Indonesia.

Kemudian mengenai kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini, termasuk juga beberapa kontribusi pengetahuan yang diambil dari analisis skripsi ini akan dituangkan ke dalam saran-saran. Dengan saran-saran itu, maka pembahasan mengenai pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar tentang konsep demokrasi di Indonesia untuk kemudian akan lebih menyentuh terhadap realitas yang terjadi di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya di dalam skripsi ini, maka jika mengacu pada pokok masalah dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa pendapat Akbar Tandjung tentang konsep demokrasi di Indonesia ialah menginginkan adanya peran dan partisipasi penuh dari rakyat. Rakyat adalah kekuatan utama dalam demokrasi. Pandangan ini sama dengan pandangan A. Muhaimin Iskandar, bahwa rakyat juga harus memiliki peran penuh dalam berdemokrasi.

Selain itu, dalam kepemimpinan, Akbar Tandjung mendiskreditkan kepemimpinan para saudagar karena karakter bisnis bisa berdampak negatif terhadap kepemimpinan. Ini berbeda dengan A. Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa dalam demokrasi siapa saja berhak dipilih dan siapa saja berhak memilih. Kepemimpinan bukan ditentukan oleh latar belakang tetapi oleh integritas dan profesionalisme.

Selain itu, dalam demokrasi di Indonesia, Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar juga memiliki kesamaan pandangan. Yaitu, demokrasi di Indonesia hendaknya mengedepankan nilai dan budaya lokal, tidak harus menyontoh budaya Barat (westernsas).

Dengan demikian, pandangan Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar terhadap demokrasi di Indonesia sama-sama menekankan pentingnya

merujuk pada kultur lokal, adat istiadat, falsafah masyarakat setempat, dalam membangun demokrasi sehingga demokrasi di Indonesia akan bisa diterapkan dengan mengedepankan nilai. Sebab, nilai-nilai semacam itulah yang akan mengakar secara abadi dalam sistem demokrasi. Dengan kata lain, tidak menerapkan demokrasi barat yang bersumber dari Amerika secara total.

Dalam memandang demokrasi di Indonesia, Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar sama-sama mengakui adanya perbedaan keyakinan, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Namun, satu hal yang membedakan Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar yaitu, mengenai persoalan konteks nilai keislaman dalam demokrasi. Dalam pandangan A. Muhaimin Iskandar tentang demokrasi, ia mengatakan bahwa konsep itu sesuai dengan asas Islam. Namun, Akbar Tandjung tidak menyinggung hal tersebut, namun bukan berarti tidak setuju.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasan dalam skripsi ini yang telah penyusun paparkan di atas, penyusun menawarkan beberapa saran penting. Harapan penyusun semoga dengan saran ini dapat mendatangkan dampak positif terhadap penerapan demokrasi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan persoalan kedaulatan rakyat sebagai tujuan dari demokrasi itu sendiri. Saran tersebut antara lain: *pertama*, hendaknya pemerintah dan DPR membuat produk peraturan perundang-undangan yang benar-benar mengangkat derajat rakyat dan menjunjung tinggi peran rakyat.

Kedua, hendaknya masyarakat tidak terlalu eksklusif atau ekstrim dalam memandang perbedaan keyakinan, agama, adat istiadat, perbedaan politik, dan lain sebagainya. Sebab, perbedaan-perbedaan itu adalah bagian dari demokrasi.

Ketiga, dalam tradisi akademik, menurut hemat penyusun, perlu sekiranya ditingkatkan studi perbandingan antara tokoh, khususnya antara tokoh yang berbeda aliran politik, seperti PKB dan PKS, PDI-P dan Demokrat, PPP dan Golkar, dalam menilai demokrasi dan hukum.

Terakhir, *keempat*, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi almamater tercinta Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 1999.
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
- Andrain, Charles F, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Aquinas, St Thomas, *Key Concepts in Politics*, Hampshire: Palgrave, 2000.
- Arinanto, Satya, "Piagam Jakarta dan Cita-cita Negara Islam", dalam Kurniawan Zein dan Saripudin HA (ed.), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Beetham, David, *Democracy and Human Rights*, Cambridge: Polity Press, 1999.
- Birch, Anthony H, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, 2nd ed, London & New York: Routledge, 2001.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- _____, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Dahl, Robert, *Analisis Politik Modern*, Jakarta: Dewaruci Pers, 1980.
- Dokumentasi Hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Semarang, 16-19 April 2005, cet. II, Jakarta: DPP PKB, 2005.
- Effendy, Bachtiar, *Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik di Indonesia*, dalam buku, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Esposito, John L., *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Grugel, Jean, *Democratization, A Critical Introduction*, Hampshire: Palgrave, 2002.
- Hanifah, Kaisar A., *Melampaui Demokrasi: Eksperimentasi Pemikiran Politik A. Muhaimin Iskandar*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- <http://tasarkarsum.blogspot.com/2007/10/sisi-buruk-pemerintahan-demokrasi.html>, Diakses tanggal 18 Juli 2010.
- <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/demokrasi-dan-pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia-beserta-contohnya/>, diakses tanggal 18 Juli 2010
- <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/demokrasi-dan-pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia-beserta-contohnya/>, diakses tanggal 18 Juli 2010.
- Huntington, *Political Science: An Introduction*, 7th ed. New, Jersey: Prentice Hall, 2000.
- Iskandar, A. Muhaimin, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia*, Yogyakarta: KLIK R, 2007.
- _____, *Ideologi, Demokrasi dan Kepentingan Nasional, Partai Advokasi: Wacana, Gerakan dan Keberpihakan*, Jakarta: CESDA LP3ES, 2005.
- _____, *Melampaui Demokrasi, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*, Yogyakarta: Kerjasama DPP PKB & KLIK R, 2006.
- _____, *Spiritualitas Sepak Bola (Perspektif Sosial Politik Piala Dunia 2006)*, Yogyakarta: KLIK R, 2006.
- _____; *Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan tentang Transisi Demokrasi Kita*.
- Karim, Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 1999.
- Khalil, 'Arif, *Nizhamul-Hukmi Fil-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Kubba, Laith, "Recognizing Pluralism", dalam *Journal of democracy*, Vol, 7, no. 2, 1996.

- Maarif, A. Syafii, dalam Kurniawan Zein dan Saripudin HA (ed.), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- _____, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 2009.
- _____, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Majalah *Biografi Politik*, volume 1. No. 5, September 2008.
- Masdar, Eman Hermawan & Umaruddin, *Demokrasi untuk Pemula*, Yogyakarta: KLIK®, 2000.
- Maso'ed, Mohtar, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mayo, Hendri B., *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan Indonesia*, Jakarta: Demos, 2005.
- Mosca, Gaetano, *Leadership in Organizations, Englewood Cliffs, New Jersey: Printice Hall*, 1999.
- Muljana, Slamet, *Kesadaran nasional: dari kolonialisme sampai kemerdekaan*, Jilid 2, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Keluarga PP al-Munawwir Krpyak, 1984.
- Nasr, Seyyed Hossein, *A Young Muslim's Guide to the Modern World*, Cambridge: Polity Press, 1993.
- Nietzsche, Frederich, *Party Institutionalization in Demodrazy*, edisi terj. Robert Harmel, London,: Roulledge, 1998.
- Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 1999.
- Ravitch, Diane, *Media, Culture and Politics in Indonesia*, Melbourne: Oxford University Press, 2000.
- Rozak, A. Ubaedillah dan Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Sahdan, Gregorius, *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 1993.

- Sahdan, Gregorius, *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*, Yogyakarta: PONDOK EDUKASI, 2004.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik; Kajian Historis Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Schmitter, Guillermo O'Donnell dan Philippe C., *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Tandjung, Akbar, *Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007.
- _____, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Tjitrosoebono, Harjono, *Konsep Negara Integralistik Menghambat Demokrasi, Menyingkap Arah dan Dampak Globalisasi: Prosiding Diskusi Informal Mengenai Hak Azazi Manusia Sekitar KTT Non Blok*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Vredenburg, J., *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Ware, Alan, *Political Parties and Party System*, New York: Oxford University, 1999.
- Weiner, Myron, *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- www.jawapos.com.
- www.lsi.co.id.
- Yusuf, Slamet Efendi, *Reformasi Konstitusi Indonesia: Perubahan Pertama UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- Zubai, Anton Bakker & Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN

Bab	Hlm.	Foonote	Terjemahan
III	79	33	“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-syura: 38)

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

- 1. Akbar Tandjung.** Ia dilahirkan di Sibolga, 14 Agustus 1945. Akbar Tandjung dilahirkan di tengah keluarga muslim, sehingga tidak mengherankan apabila ia memeluk agama Islam. Politisi handal asal Partai Golkar ini memiliki seorang istri bernama Krisnina Maharani yang lahir di Solo, pada tanggal 5 April 1960. Dari pernikahannya inilah Akbar Tandjung memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Fitri Krisnawati, Karmia Krissanty, Triana Krisandini, Sekar Krisnauli.
- 2. Muhaimin Iskandar.** Muhaimin Iskandar atau sering dipanggil dengan nama Gus Imin atau Cak Imin dilahir di Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966, hingga tahun 2010 umur Muhaimin Iskandar mencapai 44 tahun. Muhaimin Iskandar adalah politikus Indonesia yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 22 Oktober 2009. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin Iskandar memperoleh gelar sarjana politik dari Universitas Gadjah Mada dan magister komunikasi dari Universitas Indonesia. Ia menjabat sebagai wakil ketua DPR pada periode 1999-2004. Muhaimin Iskandar menikahi seorang perempuan bernama Rustini Murtadho. Dari pernikahannya inilah Muhaimin Iskandar dikarunia anak semata wayang.
- 3. As-Sayyid Sabiq.** Nama lengkapnya adalah As-Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamy, At-Tihamy merupakan gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal keluarga. Beliau lahir pada tahun 1915. As-Sayyid Sabiq pada usia 10-11 tahun telah mampu untuk menghafalkan al-Qur'an dengan baik, pendidikan beliau habiskan di al-Azhar Mesir, mulai dari tahassus sampai perguruan tinggi. Diantara guru-guru beliau yang masyhur adalah Syeikh Muhammad Syaltut dan Syeikh Tahir ad-Dinari.
- 4. Imam Al-Bukhāri.** Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismāil Ibn Muqirah al Jufi. Lahir di Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Imam al-Bukhāri memiliki daya hafalan yang sangat kuat dalam bidang hadis, ketika masa kanak-kanak beliau sudah bisa untuk menghafal hadis sebanyak 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya, dapat mengetahui hari lahir dan hari wafat serta tempat perawi hadis, yang kemudian beliau catat. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab hadis yang terkenal dengan kitab Sahih Bukhāri, yang disusun dalam waktu 15 tahun, dalam kitab tersebut berisikan 7.297 hadis. Diantara karya-karya beliau yang lain adalah al-Mabsut al-Qirā'at

al-Khalfal Iman, at-Tafsir al-Kabir dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 156 H.

5. **Ali Harb.** Ali Harb adalah seorang penulis, pemikir, dan filsuf kelahiran Libanon pada tahun 1941. Ali Harb menyelesaikan pendidikan akademisnya di universitas Libanon dan meraih gelar Magister di bidang filsafat pada 1978. Sejak tahun 1976 sampai 1993 ia mengajar filsafat Arab dan Yunani di almaternya, disamping itu juga aktif menyampaikan mata kuliah dalam berbagai simposium dan seminar tentang budaya dan pemikiran di negara Arab di luar Libanon seperti Tunisia, Maghribi, Kuwait, dan Mesir. Kini ia masih mengajar di Universitas Beirut Libanon. Sebagai penulis, Ali Harb tergolong produktif. Dia telah melahirkan karya-karya yang sangat berpengaruh di dunia pemikiran Islam seperti *At-Ta'wīl Wa al-Haqīqah* (1989), *Al-Hub Wa al-Fanā'* (1990), *Lu'bah al-Manā'* (1991), *Naqd an-Naṣh* (1993), *Naqd al-Haqīqah* (1993), *Al-Ahlām al-Uṣhūliyyah Wa asy-Sya'air at-Taquadumiyyah* (2001), dan karya-karya lainnya. Karya-karya ini sangat berpengaruh terhadap dunia pemikiran Islam terutama dalam bidang Filsafat, linguistik, kritik teks keagamaan dan sebagainya.
6. **Farid Esack.** Farid Esack dilahirkan di Afrika selatan. Wilayah ini adalah wilayah pluralitas agama. Sejak kecil ia sudah bersentuhan dengan tetangganya yang plural. Pada umur 9 tahun ia sudah aktif dan bergabung dengan Tablighi Jama'ah, sebuah gerakan revivalis Muslim Internasional. Salah satu karyanya yang cukup monomental adalah *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*, (Oxford: Oneworld, 1997), *On Being a Muslim Finding a Religious Path The World Today*, (Oxford: Oneworld, 1999). Pemirannya yang cukup menarik adalah tentang hermeneutika pembebasannya dengan memahami sebuah teks suci. Tampaknya ia cukup kritis terhadap tokoh lainnya seperti Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun dalam dunia pemikiran Islam.
7. **Fazlur Rahman.** Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Pakistan. Karir pendidikannya dimulai pada Deoband Seminary (Sekolah Menengah Deoband). Kemudian dilanjutkan ke Punjab University di Lahore. Dan di sana juga, ia mendapatkan gelar MA-nya. Pada tahun 1950-1958 ia mengajar bahasa Persi dan Filsafat Islam di Durham University. Pada tahun 1969, ia dikukuhkan sebagai guru besar pemikiran Islam di Departement of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Adapun tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi pemikiran Rahman adalah al-Farabi (w. 950), Ibn Sina (w. 1037), al-Gazali (w. 1111), Ibn Taimiyah (w. 1328), Ahmad Sirhindi (w. 1624) dan Syah Waliyullah (w. 1762). Selanjutnya, Jamaluddin al-Afghani (w. 1897), Muhammad Abduh (w. 1905), Sir sayyid Ahmad Khan (w. 1905), Syibli Nu'mani (w. 1914) dan Muhammad Iqbal (w. 1938). Adapun karya monumentalnya adalah *Major Themes of the Qur'an*, (1979), *Islamic Methodology in History*, (1965), *Islam and Modernity: Transformation of the Intellectual Tradition*, (1984), *Islam*, (1979).

- 8. Mohammed Arkoun.** Mohammed Arkoun dilahirkan pada 2 Januari 1928 di desa Berber, Taorirt, Mimoun, Kabylia, Aljazair, suatu wilayah yang oleh penulis Arab disebut Barat Tengah (central magrib atau al-magrib al-awsath), pada saat ini, 29 % Muslim Aljazair masih berbahasa Berber yang diwarisi Afrika utara dari zaman pra-Islam dan pra-Romawi. Sebagai anak seorang pedagang rempah-rempah, Arkoun tumbuh menjadi sarjana dan pemikir internasional yang sangat sukses. Latar pendidikan Mohammed Arkoun, dimulai sejak dia mengikuti sekolah dasar di desanya, kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Atas di kota pelabuhan Oran, jauh dari daerah asalnya Kabilia. Dari tahun 1950-1954 M, ia belajar bahasa dan sastra arab di universitas Aljir, sambil mengajar bahasa Arab pada sebuah Sekolah Menengah Atas di al-Harrach, daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Pada tahun 1954 – 1959, Arkoun menjadi guru di SLTA (Lycee) di Strasbourg, di samping diminta memberikan kuliah di Fakultas Sastra di Universitas Strasbourg. Pendidikan formal terakhir diselesaikan Arkoun dengan meraih gelar doktor bidang sastra pada 1969 dari universitas Sorbonne di Paris – dengan disertasi tentang humanisme dalam pemikiran etis Miskawaih, seorang pemikir Muslim Persia dari akhir abad ke-10 hingga awal abad ke-11 Masehi (w. 1030 M).
- 9. Muhammad Shahrur.** Muhammad Shahrur adalah seorang pemikir liberal Islam asal Syiria, pendidikan dasar dan menengahnya di tempuh di al-midan di pinggiran kota BG sebelah selatan Damaskus. Pada tahun 1957-1964 Shahrur dikirim ke Saratow dekat Moskou untuk belajar teknik. Gelar MA. Ph.D-nya di tempuh di Universitas Collage di Dublin sampai pada tahun 1972. kemudian dia diangkat sebagai profesor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus pada tahun 1972-1999. karyanya yang cukup monumental adalah *Al-Kitāb wā Al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āshirah*, (1992). Dalam karya ini Shahrut menemukan teori-teori dalam hermeneutika. Khususnya dalam ilmu-ilmu al-Qur’an. Karya terbarunya adalah *Nahw Uṣhūl al-Jadīdah lī al-Fiqh al-Islāmī*, (2000).
- 10. Sayyid Qutb.** Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Shadili. Ia lahir di perkampungan Musha dekat kota Asyud Mesir, pada tanggal 9 Oktober 1906 M. pendidikan dasarnya selain diperoleh di sekolah Kuttāb, juga dari sekolah pemerintah dan tamat pada tahun 1918 M. Selain sebagai tenaga pengajar di Universitas Dar al-Ulum (Universitas Mesir Modern) ia juga bekerja sebagai pegawai pada kementerian pendidikan bahkan sampai menduduki jabatan inspektur. Sayyid Qutb, dalam pemirannya banyak memberikan pengaruh pada generasi pemikir Islam selanjutnya seperti Nashr Hamid Abu Zaid, Muhammad Taufiq Barakat dan ulama-ulama Mesir lainnya. Ia juga sempat bergabung dalam keanggotaan Ikhwanul Muslimin kemudian disinilah Sayyid Qutb banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hasan Al-Banna dan al-Maududi.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Achmad Riyanto
Tempat tanggal lahir : Sumenep, 16 Januari 1982
Alamat asal : Jln. Raya Gapura Barat Belakang Kantor POLSEK
Gapura Barat. Desa Gapura Barat Kec. Gapura Barat
Kab. Sumenep 69472
NO HP : 081328529529

Nama Orang Tua

Ayahanda : Saniman Syahrin
Ibunda : Juma'atiah

Riwayat Pendidikan :

1. TK Gapura Barat, lulus tahun 1989
2. SDN Gapura Barat I, Lulus Tahun 1994
3. SMPN Gapura, lulus tahun 1997
4. TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, lulus tahun 2001
5. UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, sekarang.

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (DPP FORMASI) 2008 – 2009
2. Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (ashram bangsa) 2005 – 2006

3. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIY
2008-2010
4. Ketua Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PMII se-Indonesia & Jogja Informal
meeting (JIM) 2009
5. Ketua Ospek Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006
6. MensosPolkam Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2006 - 2008
7. Pjs. Presiden Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Merdeka (DPP PRM)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006 - 2007
8. Staff MENLU Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2005 - 2007
9. Ketua Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII Rayon Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004
10. Ketua Panitia Panggung Sayonara BEM-J PMH Fakultas Syari'ah Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2004
11. Ketua Umum OSIS SMPN I Gapura Barat 1995